

# BAB I

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

UUD 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Selain itu, diamanatkan pula agar pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan menempati salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan. Dalam menghadapi perkembangan baik nasional maupun internasional yang demikian mengglobal dan semakin kompleks, maka menuntut tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan bidang yang harus mampu menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan.

Pada tingkat Nasional, program yang dilaksanakan tetap mengacu pada 4 program strategis yaitu peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan efisiensi pendidikan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, program rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun merupakan program strategis yang terus diupayakan penuntasannya secara nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Pendidikan merupakan urusan wajib dasar yang menjadi salah satu program prioritas nasional yang harus di laksanakan dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumberdaya Manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan. Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan menengah umum.

Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknonogi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis

sumber daya lokal. Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan diharapkan dapat sinergi antara *top-down planning dan bottom up planning* berbasis anggaran, terpadu dan terprogram.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan semua program dan kebijakan tersebut, maka disusun perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pendidikan dengan menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap III Tahun 2017 - 2022, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, meliputi :

**a. Manajemen Pendidikan**

- Pengelolaan pendidikan dasar;
- Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

**b. Kurikulum**

- Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

**c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota

**d. Perizinan Pendidikan**

- Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022, yaitu :

1. Landasan idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014— 2019;
17. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;
20. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022.
22. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2017 - 2022 adalah untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Kota Pekanbaru.

#### **b. Tujuan**

1. Mengidentifikasi sejumlah permasalahan pendidikan di Kota Pekanbaru yang diperkirakan menghambat pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan program unggul, nyaman dan sejahtera.
2. Mendapatkan gambaran tentang kondisi, potensi dan ketersediaan sumber daya bidang pendidikan di Kota Pekanbaru, sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada dan mengalokasikan sumber daya serta dana secara lebih efisien.
3. Menyusun sejumlah langkah aksi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
4. Membangun agenda dan langkah kerja yang sistematis guna mendukung

dan mengimplementasikan kebijakan strategis Pemerintah Kota Pekanbaru ke dalam sejumlah langkah dan kegiatan yang lebih operasional dan implementatif.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Berisi uraian tentang latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan**

Memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah: tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

##### **BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan**

Bagian ini menyajikan informasi mengenai : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan: telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan bidang pendidikan di Kota Pekanbaru.

##### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

##### **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bagian ini menyajikan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dan**

**BAB VIII Penutup**

## BAB II

# 2. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

### 2. 1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

#### **Tugas Pokok :**

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Pekanbaru.

#### **Fungsi :**

Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

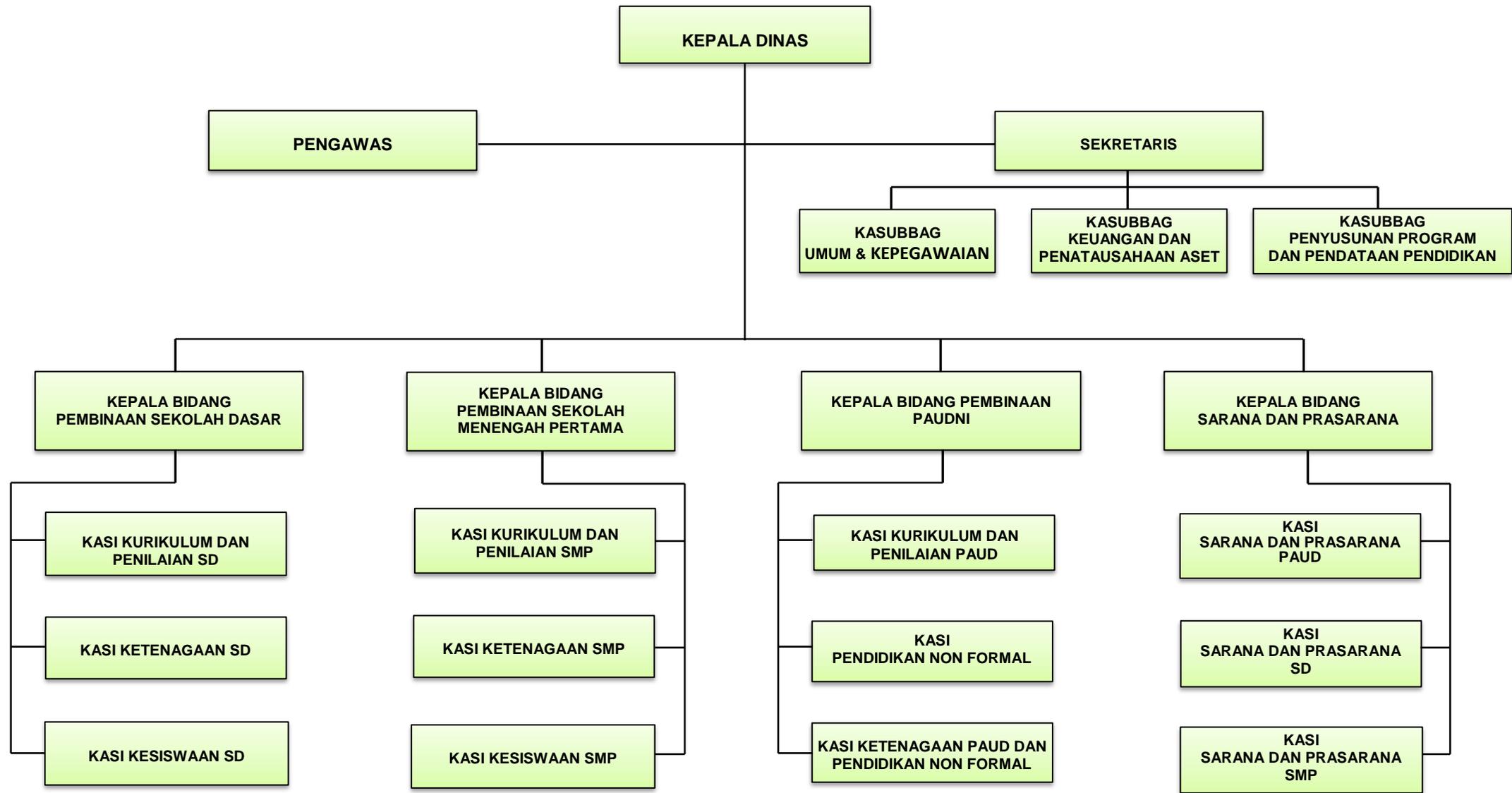
Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas :

1. Pelaksanaan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pendidikan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
3. Penyusunan dan perumusan program dan anggaran Dinas Pendidikan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang pendidikan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
6. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya pengelolaan keuangan dinas;
7. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Struktur Organisasi**

Sesuai dengan kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas. maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan yang berlaku sekarang sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat membawahi :**
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pendataan Pendidikan
  - c) Sub Bagian Keuangan dan Penataan Aset
- 3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal membawahi :**
  - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD
  - b) Seksi Pendidikan Nonformal
  - c) Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
- 4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) membawahi :**
  - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
  - b) Seksi Ketenagaan SD
  - c) Seksi Kesiswaan SD
- 5. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah menengah Pertama (SMP) membawahi:**
  - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
  - b) Seksi Ketenagaan SMP
  - c) Seksi Kesiswaan SMP
- 6. Bidang Sarana dan Prasarana Membawahi :**
  - a) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD
  - b) Seksi Sarana dan Prasarana SD
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana SMP
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

### 1. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (tidak termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar) sampai dengan Bulan Desember 2016 sebanyak : 231 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Sub Bagian Keuangan dan Penataan Aset dan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pendataan Pendidikan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Sarana dan Prasarana.

Tabel 2. 1.  
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	15
3.	Golongan III	82
4.	Golongan IV	134
<b>Jumlah</b>		<b>153</b>

Sedangkan jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebanyak 8.878 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya sebanyak 58,8% dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) non PNS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.  
Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Total
		<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	PAUD	206	12	74	12	767	5	-	1.076
2	SD	209	10	273	59	5.132	110	-	5.793
3	SMP	23	23	29	86	2.354	132	2	2.649
<b>Total</b>		<b>438</b>	<b>45</b>	<b>376</b>	<b>157</b>	<b>8.253</b>	<b>247</b>	<b>2</b>	<b>9.518</b>

Tabel 2.3.  
Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian

No	Jenjang	Status PNS dan NON PNS		Total
		PNS	NON PNS	
1	TK	66	1.010	1.076
2	SD	2.320	3.473	5.793
3	SMP	1.250	1.399	2.649
<b>Total</b>		<b>3.636</b>	<b>5.882</b>	<b>9.518</b>

## 2. Keadaan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa

Tabel 2.4.  
Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Setiap Satuan Pendidikan

Penduduk Usia Sekolah		Keadaan Siswa	
Usia	Jumlah	Satuan Pendidikan	Jumlah
Usia 4-6 Tahun	59.941	TK/TPA/KB/SPS	16.396
Usia 7-12 Tahun	106.954	SD/MI	121.781
Usia 13-15 Tahun	54.229	SMP/MTs	52.372

### 3. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Tabel 2. 5.  
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Ruang Kelas			
		Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sdg/Brnt
TK	272	-	-	-	-
SD	299	3.084	1.976	1.067	41
MI	23	221	172	48	1
SMP	129	1.324	765	544	5
MTs	30	317	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>831</b>	<b>4.408</b>	<b>2741</b>	<b>1.611</b>	<b>46</b>

#### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya. Menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	APK SD/MI (termasuk di dalamnya siswa)				100	100	100	100	100	112.32	113.27	115.13	118.25	120.32	112.32	113.27	115.13	118.25	120.32
2	APK SD/MI (khusus Kota Pekanbaru)				100	100	100	100	100	106.62	106.47	110.02	115.73	118.56	106.62	106.47	110.02	115.73	118.56
3	APMSD/MI (termasuk di dalamnya siswa)				92.50	91.00	93.82	95.72	98.54	93.00	91.73	94.70	96.12	99.01	100.54	100.08	100.94	100.42	100.48
4	APMSD/MI (khusus Kota Pekanbaru)				90.00	91.00	92.50	94.00	95.80	92.70	90.73	93.98	95.81	98.15	103.00	99.70	101.60	101.93	102.45
5	APK SMP/MTs (termasuk di dalamnya siswa)				76.30	83.21	80.25	96.00	95.00	77.19	84.08	81.37	97.21	99.07	101.17	101.05	101.40	101.26	104.28
6	APK SMP/MTs (khusus Kota Pekanbaru)				75.50	82.00	83.00	92.00	96.25	76.23	83.50	80.24	95.78	98.12	100.97	101.83	96.67	104.11	101.94
7	APM SMP/MTs				60.15	64.39	61.34	74.52	76.48	61.34	65.27	62.81	75.64	77.59	101.98	101.37	102.40	101.50	101.45
8	APM SMP/MTs (khusus Kota Pekanbaru)				61.00	63.85	65.12	72.52	74.34	60.88	64.03	61.25	74.72	76.54	99.80	100.28	97.06	103.03	102.96

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
9	Angka Putus Sekolah SD/MI				-	-	-	-	-	0.010	0.09	0.06	0.02	0.02					
10	Angka Putus Sekolah SMP/MTs				-	-	-	-	-	0.30	0.22	0.13	0.02	0.01					
11	USB SD				2 unit	4 unit	5 unit	5 unit	6 unit	-	4 unit	3 unit	1 unit	-					
12	USB SMP				2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	2 unit	-	4 unit	1 unit	1 unit	3 unit					
13	Rehabilitasi SD				-	-	-	-	-	8 sklh	18 sklh	21 sklh	17 sklh	23 sklh					
14	Revitalisasi SD				-	-	-	-	-	7 sklh	5 sklh	6 sklh	8 sklh	-					
15	Rehabilitasi SMP				7 sklh	7 sklh	7 sklh	7 sklh	7 sklh	10 sklh	4 sklh	13 sklh	5 sklh	2 sklh					
16	Revitalisasi SMP				10 sklh	10 sklh	10 sklh	10 sklh	10 sklh	-	2 sklh	2 sklh	1 sklh	2 sklh					
17	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD				15 RKB	40 RKB	40 RKB	40 RKB	60 RKB	4 RKB	17 RKB	-	27 RKB	-					
18	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP				20 RKB	25 RKB	25 RKB	30 RKB	30 RKB	-	4 RKB	23 RKB	-	3 RKB					
19	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
20	Peningkatan aksesibilitas pendidikan non formal (Kejar Paket A.B dan C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Tingkat kelulusan SMP/MTs									99.68	99.47	99.96		100					

Tabel 2.7  
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,018,964,309	6,415,397,559	5,958,112,565	6,688,868,804	6,059,801,304	7,318,014,447	3,487,593,293	4,868,317,329	5,720,286,540	5,712,493,305	81.41	54.36	81.70	85.51	94.26		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,560,702,909	20,214,264,079	16,139,935,750	10,720,033,000	484,462,431	6,491,881,665	8,735,555,500	7,637,771,510	2,786,596,250	420,643,968	85.86	43.21	47.32	25.99	86.82		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	91,850,000	153,024,000	142,700,000	-	-	91,342,000	133,271,000	122,785,000	-	-	99.44	87.09	86.04	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	50,800,000	6,825,000	59,900,000	29,800,000	-	84.66	11.37	99.83	49.66	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	21,387,246	22,899,440	43,264,004	157,740,000	25,737,500	21,386,500	21,998,604	29,528,500	64,172,000	22,237,500	99.99	96.06	68.25	40.68	86.40		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun	31,673,665,087	63,151,256,192	87,434,036,860	73,578,840,095	54,280,922,109	26,736,269,810	55,511,204,592	55,962,200,610	69,324,114,185	41,712,240,805	84.412	87.902	64.005	94.217	76.845		
Pendidikan Non Formal	1,120,370,299	3,125,510,816	2,570,554,550	2,633,841,750	428,902,180	1,014,376,569	2,933,969,316	2,330,351,000	2,493,878,150	305,710,780	90.539	93.872	90.656	94.686	71.278		
Program Pendidikan Luar Biasa	137,321,998,921	146,827,863,562	59,404,516,613	63,623,782,985	239,440,125	134,259,759,871	139,649,290,262	54,845,069,663	53,085,792,600	161,685,000	97.770	95.111	92.325	83.437	67.526		
Program Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,579,289,279	4,987,527,880	5,041,773,390	3,800,863,081	56,309,967,900	2,189,760,520	3,726,822,662	3,657,051,978	3,044,173,543	36,940,842,784	84.898	74.723	72.535	80.092	65.603		
Manajemen pelayanan Pendidikan	166,047,085	2,421,488,774	2,142,568,492	1,276,184,876	413,095,750	107,855,135	1,213,877,929	679,359,102	748,050,650	342,041,750	64.955	50.129	31.708	58.616	82.800		

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

### Tantangan :

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- b. Pada jenjang dikmen khususnya SMK, antara kompetensi lulusan dengan dunia kerja (pelung kerja) masih kurang relevan;
- c. Aksesibilitas penyelenggraan pendidikan pada jenjang menengah masih belum merata;
- d. Angka kemiskinan relatif tinggi;
- e. Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan/karyawatnya pada penduduk yang masih usia sekolah;

### Peluang :

- a. Komitemen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal (pendidikan menengah);
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);

- e. Kepedulian masyarakat terhadap pembangunan sektor pendidikan melalui program CSR (corporate social responsibility)-nya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- f. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
- g. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah;
- h. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

## BAB III

### 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Menyikapi hal demikian analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan aturan/kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan. Oleh karena itu dalam menentukan tingkat keberhasilan harus pula disertai dengan tingkat kesiapan fungsi secara sistemik melalui kajian analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat).

##### A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang didalamnya mencakup (1) sumber daya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Kekuatan

- a) Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kota Pekanbaru secara berkesinambungan,

efektif-efisien dan bersinerji menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali.

- b) Adanya perbaikan yang terus menerus dari seluruh jajaran pendidikan di Kota Pekanbaru untuk mendukung dan memantapkan program yang dirumuskan dalam visi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terwujudnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas Menuju Smart City Madani dengan Misi; Melaksanakan pelayanan prima di lingkungan internal maupun eksternal organisasi berbasis IT; Melaksanakan akses pendidikan yang merata dan bermutu di semua jenjang dan jenis pendidikan; Melaksanakan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing; Melakukan kerjasama dengan stakeholder.
- c) Tersedianya sumberdaya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan.
- d) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia Global, hal ini dapat dilihat dari asset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran gedung persekolahan, mesin- mesin, perbengkelan, jaringan internet (LAN) dan yang lainnya serta didukung dengan operator-operator yang handal dan terampil.
- e) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai sekolah. Siap melaksanakan pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

## 2. Kelemahan

Dalam penyelenggaraan Bidang Pendidikan juga tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan. Dalam kehidupan sosial masih muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai akibat belum stabilnya kondisi Ekonomi yang mengakibatkan banyaknya anak rawan dan putus sekolah, faktor budaya yang sangat kental mempengaruhi perilaku anak disamping masih terdapat anak- anak yang masuk usia sekolah tapi enggan untuk bersekolah.

Di sisi lain peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, mengingat daya tampung siswa saat ini masih belum memenuhi akan kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar mengajar. Sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang perubahan Aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Dilain pihak kemampuan tenaga kependidikan untuk mengembang tugasnya secara profesional melalui pelatihan – pelatihan masih perlu ditingkatkan. Pembangunan pendidikan didalamnya mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metoda pembelajaran, dan murid. Permasalahan pendidikan yang dihadapi Dinas Pendidikan adalah :

- a) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Akses dan pemerataan pendidikan adalah :
  1. Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah.
  2. Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada.
  3. Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk.

4. Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi yang hidup dimasyarakat yang kurang pentingnya pendidikan.
  5. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.
- b) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah :
1. Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran belum dapat memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan belum berkembang pada semua sekolah.
  2. Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran
  3. Belum terpenuhinya kesejahteraan minimal guru.
  4. Belum meratanya disiplin guru dalam melaksanakan tugas.
  5. Inovasi dalam perencanaan kurikulum belum merata pada semua sekolah, dan sekolah level bawah cenderung ketidaksiapannya semakin tinggi.
  6. Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah.
  7. Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik.
  8. Kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah sebagai media belajar masih lemah.
  9. Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram.
  10. Kolaborasi dalam pembaruan kegiatan belajar melalui kerja sama antara

guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja.

11. Belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru.
12. Belum ditetapkan standar mutu yang menjadi indikator pencapaian program.
13. Belum terdapat kebijakan untuk menetapkan kendali mutu yang merupakan rencana implementasi kebijakan tingkat nasional.

c) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan revalansi pendidikan :

1. kurangnya sekolah dalam mewadahi siswa yang berprestasi;
2. Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal;
3. Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
4. Lulusan sekolah kurang memiliki ketrampilan dan kecakapan hidup; mengacu kepada kebutuhan pasar;
5. Belum Optimalnya kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
6. Belum mampu menjanjikan nilai jual lulusan;

d) Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan efisiensi pendidikan adalah :

1. Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah,
2. Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru dan supervisi kinerja guru,
3. Mutu Pelayanan Administratif bidang kurikulum, sarana pendidikan, dan bidang pengembangan profesi belum optimum.
4. Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan

sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah. Pengembangan inovasi dalam memenuhi kebutuhan perkembangan siswa terdapat permasalahan seperti : Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan hal ini disebabkan karena :

- a. Belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
  - b. Kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan
  - c. Belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data primer;
  - d. Kurangnya dukungan dana operasional dan alat transportasi untuk pendataan :
- e) sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategik dan program tahunan pada tingkat kota maupun tingkat sekolah belum berkembang baik;
  - f) proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
  - g) Sekolah kurang dapat berfungsi optimal sebagai wahana belajar yang terencana;
  - h) Sistem evaluasi dapat berfungsi sebagai bahan perbaikan belajar-mengajar dan manajemen pelaporan untuk pengembangan data pada tingkat sekolah masih sangat lemah;
  - i) Permasalahan dalam bidang manajemen pendidikan adalah, tidak jelasnya konsep otonomi daerah dibidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999, masih tingginya peran pemerintah pusat dalam masalah-masalah teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
  - j) Masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan, kurang tersedianya

data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel yang bisa dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengendalian program pendidikan;

- k) Verifikasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Sekolah belum melibatkan seluruh stake holders sekolah secara transparan, serta belum optimumnya dalam pengelolaan administrasi keuangan sekolah, lebih ditingkatkan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dana yang berasal dari masyarakat;
- l) Pengelolaan bantuan keuangan terhadap sekolah maupun siswa perlu terpantau dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan dana secara efektif;
- m) Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif;
- n) Standar mutu kinerja personal dan lembaga belum ditetapkan sebagai bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam implementasi kegiatan dan evaluasi.

## **B. Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar lembaga kedinasan yang ikut mempengaruhi dan mewarnai terhadap kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini faktor-faktor luar termaksud adalah situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi globalisasi.

### **1. Peluang**

- a) Keberadaan media masa elektronik maupun cetak di kota Pekanbaru perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program- program kepada

masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerja sama yang saling menguntungkan.

- b) Kota Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi Riau dan salah satu kota besar di Sumatera, merupakan salah satu tujuan menuntut ilmu, dengan banyaknya lembaga pendidikan berbagai jenjang, jika dimanfaatkan secara optimal jajaran pendidikan kota Pekanbaru untuk bersama sama membangun SDM yang cerdas, terampil dan sehat Jasmani dan Rohani.
- c) Tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
- d) Terbentuknya forum forum pendidikan yang mampu dan mau mengembangkan program peningkatan mutu
- e) Adanya komitmen pemerintah dan peran pemerintah dalam mendukung program peningkatan mutu
- f) Adanya komitmen pemerintah dalam rangka mendukung pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD
- g) Tingginya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dibuktikan dengan berdirinya lembaga lembaga pendidikan swasta formal maupun non formal
- h) Adanya dukungan perusahaan perusahaan besar yang ada di propinsi Pekanbaru
- i) Adanya dukungan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
- j) Tersedianya lahan yang dapat dikembangkan untuk pelayanan pendidikan

## 2. Tantangan

- a) Kualitas SDM masih rendah, karena masih ada kualifikasi pendidikan guru D11 dan D111
- b) Ratio dan distribusi pengadaan pendidik yang proposional sehingga dapat memenuhi kebutuhan
- c) Pemenuhan kebutuhan jumlah dan kualifikasi pendidik pada setiap satuan pendidikan
- d) Perencanaan kebutuhan program peningkatan mutu berbasis pada hasil pendataan
- e) Peningkatan kualitas lembaga pendidikan sesuai dengan Standart Nasional Pendidikan
- f) Pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dengan menggunakan teknologi komunikasi informasi dan berbasis pembelajaran yang kontekstual
- g) Sinergi kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
- h) Adanya komitmen pemerintah dalam rangka melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan pendidikan guna mencegah terjadinya KKN dan meningkatnya akuntabilitas dan pencitraan public.
- i) Dinas pendidikan tidak memiliki kewenangan merekrut dan memutasi guru.
- j) Kualitas sarana prasarana pendidikan yang masih kurang memadai.
- k) Anggaran pendidikan yang kurang memadai dibandingkan kebutuhan yang seharusnya.
- l) Belum maksimalnya peran serta orang tua siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik.

- m) Budaya belajar siswa yang belum maksimal.
- n) Sosial kultural yang kurang mendukung.
- o) Sistem pengawasan pendidikan yang masih lemah.
- p) Kualitas input (calon siswa) pada beberapa jenjang pendidikan menengah masih rendah.
- q) Penerapan manajemen berbasis sekolah belum optimal.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru**

#### **VISI**

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru 2005-2025 adalah :

**“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa”**

RPJMD ke-3 (2017-2022) ini ditujukan untuk memenuhi Tema pembangunan tahap lima tahun ke-3 (2016-2020) dari RPJPD Kota Pekanbaru 2005-2025, yaitu: **“Penataan Kota dan penyediaan infrastruktur yang memadai guna menunjang pengembangan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan melayu, didukung dengan pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia”**

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka

panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 sesuai dengan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai *Smart City* Madani”**

Penjelasan dari terminologi Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

***Smart City***, adalah : Terjemahannya adalah Kota Pintar atau Kota Cerdas, yaitu sebuah tatanan kota yang menggunakan sistem teknologi informasi sehingga memudahkan di dalam pengelolaan kota dan pelayanan warganya. *Smart City* ini meliputi 6 (enam) pilar, yaitu *Smart Government* (pemerintahan pintar), *Smart Economy* (ekonomi pintar), *Smart Mobility* (mobilitas pintar), *Smart People* (masyarakat pintar), *Smart Living* (lingkungan pintar), dan *Smart Live* (hidup pintar).

***Madani***, adalah :

Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Misi Kota Pekanbaru 2017-2022 :

Dalam rangka pencapaian visi Terwujudnya Pekanbaru sebagai *Smart City* Madani, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.

2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai (sesuai dengan RPJP tahap ke-3).
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulanya itu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

Dinas Pendidikan berkontribusi terhadap pemenuhan Visi dan Misi Kota Pekanbaru untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi, mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya Melayu serta mewujudkan Pekanbaru Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau**

#### **Telaah Visi dan Misi**

Dalam rangka mewujudkan cita cita mencerdaska kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbud mempunyai visi 2025 untuk “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”. yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestesis.

Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan

pendidikan nasional. Tema pembangunan yang ketiga (2015 - 2019) difokuskan pada daya saing regional pendidikan dan kebudayaan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendikbud 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pendidikan dan Kebudayaan Berkualitas dalam Membentuk Karakter  
Insan Indonesia yang Tangguh dan Berdaya Saing”**

Untuk mewujudkan misi tersebut, Kemendikbud telah menetapkan empat misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas, Relevansi dan Daya Saing
3. Melestarikan dan Mengembangkan Kebudayaan
4. Memperkuat Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan

**Tujuan Strategis**

Untuk merealisasikan visi dan misi Kemendikbud, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2015 - 2019 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015 - 2019 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan serta sistem tata kelola yang diperlukan untuk mewujudkan pendidikan dan kebudayaan berkualitas, sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2015 - 2019 Kemendikbud, tujuan strategis Kemendikbud 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal (PNFI).
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar.
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas serta Relevansi Pendidikan Menengah.
4. Meningkatkan Akses, Kualitas dan Relevansi serta Daya Saing Pendidikan

Tinggi.

5. Meningkatkan Ketrampilan Angkatan Kerja yang Berkualitas dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat.
6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.
7. Menyediakan, meningkatkan, kualifikasi dan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan warisan seni, budaya, dan bahasa Indonesia.
9. Meningkatkan akuntabilitas manajemen pendidikan dan kebudayaan.

#### **Sasaran Jangka Menengah**

Guna mencapai tujuan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran peningkatan pendidikan dan pengembangan anak usia dini.
2. Sasaran pendidikan dasar yang berkualitas (akses, kualitas, pendidikan agama dan kewarganegaraan).
3. Sasaran pendidikan menengah (akses, kualitas, pendidikan agama dan kewarganegaraan).
4. Sasaran peningkatan pemerataan akses, peningkatan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.
5. Sasaran peningkatan ketrampilan angkatan kerja.
6. Sasaran peningkatan kualitas pembelajaran.
7. Sasaran peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan dan reformasi LPTK.
8. Sasaran mengembangkan, melindungi, dan memanfaatkan warisan seni, budaya

dan bahasa Indonesia.

9. Sasaran meningkatkan akuntabilitas manajemen pendidikan dan kebudayaan.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendikbud 2015 - 2019 sebagaimana disebut di atas, maka ada beberapa faktor penghambat dan pendorong dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Faktor penghambat dan pendorong dimaksud tidak jauh berbeda dengan faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi gubernur Riau sebagaimana penjelasan di atas.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Pekanbaru**

Renstra Dinas Pendidikan ini dimulai dengan Strategi Pengembangan Kota Pekanbaru yang dijabarkan menjadi skenario pengembangan kota dan konsep struktur ruang kota. Skenario ini akan mengarah pada pengembangan Kota Pekanbaru yang direncanakan ke depan. Adapun skenario tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan kawasan pusat kota (Kecamatan Pekanbaru Kota, Senepelan, Sukajadi, Sail dan Limapuluh) sebagai kawasan perdagangan dan jasa, dengan skala pelayanan regional dan internasional dengan dominasi peruntukan lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa regional dan Internasional, perumahan perkantoran (*town house* dan apartemen), yang diintegrasikan dengan sistem jaringan transportasi massal dan sistem jaringan transportasi regional melalui jalan tol, akses ke Bandara dan Pelabuhan-pelabuhan di sungai Siak
2. Mengembangkan kawasan permukiman perkantoran ke arah selatan, timur dan barat kota (Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai, Bukitraya, Tenayan Raya dan

Payung Sekaki)

3. Mengembangkan koridor-koridor jalan utama untuk kegiatan perdagangan dan jasa secara vertikal dengan memperhatikan peraturan zonasi (zoning regulation) dan building code
4. Mengembangkan terminal Bandar Raya Payung Sekaki sebagai pusat pelayanan transportasi kota yang menjadi orientasi dan perpindahan antar moda transportasi dengan didukung oleh akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara dan pelabuhan.
5. Mengembangkan kawasan pendidikan di kecamatan Tampan, Tenayan Raya, Bukit Raya, Marpoyan Damai dan Kecamatan Payung Sekaki yang didukung oleh akses ke sistem jaringan transportasi massal. Pada saat ini perkembangan pemukiman penduduk dan anak usia sekolah lebih terkonsentrasi pada kecamatan Tenayan, Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai dan kecamatan Payung Sekaki. Untuk mengantisipasi lonjakan anak usia sekolah tersebut, maka kebijakan pemerintah Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan, dalam hal penambahan unit Sekolah Baru (USB) lebih diutamakan ke kecamatan Tampan, Tenayan, Bukit Raya, Marpoyan Damai dan kecamatan Payung Sekaki.
6. Mengembangkan kawasan industri dan pergudangan di kecamatan Tenayan Raya yang didukung oleh akses ke sistem jaringan transportasi massal dalam kota, jaringan transportasi regional, bandara dan pelabuhan, serta didukung dengan pengembangan kawasan permukiman industri yang dilengkapi dengan fasilitas dan jaringan utilitas yang memadai
7. Mengembangkan kawasan kompleks Caltex sebagai jalur hijau (Green Belt) dengan tetap menjaga terbukanya akses ke kompleks dari berbagai kawasan
8. Mempertahankan Danau Lembah Sari dan Kawasan Lindung Taman Hutan Raya

Sultan Syarif Kasim sebagai Kawasan Lindung dan menjadikan kawasan sekitarnya sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*).

Memperhatikan skenario pengembangan kota yang dikemukakan di atas, konsep struktur ruang wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kawasan pusat kota sebagai Pusat Pengembangan Utama Kota dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
2. Terdapat beberapa Sub-Pusat Pengembangan yang disesuaikan dengan kecenderungan perkembangan dan skenario pengembangan kota 20 tahun ke depan.
3. Pusat pengembangan dan masing masing sub pusat pengembangan dikembangkan dengan penekanan pada fungsi tertentu yang secara keseluruhan dapat menunjang Visi Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru.
4. Antara Pusat Pengembangan dan sub sub Pusat Pengembangan diintegrasikan oleh sistem jaringan transportasi yang memungkinkan terjadinya pergerakan orang dan barang secara efisien.
5. Sistem jaringan transportasi yang tidak hanya menjamin terjadinya pergerakan internal dalam kota, namun juga mendukung terjadi interaksi dengan wilayah sekitar.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

#### **1. Akses:**

1. Peningkatan ketersediaan layanan PAUD di Kota Pekanbaru.
2. Peningkatan angka partisipasi PAUD.
3. Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan terutama di pedesaan terhadap pentingnya PAUD bagi pengembangan potensi anak (Golden Age).

4. Peningkatan keterjangkauan dan ketersediaan layanan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan bagi anak keluarga prasejahtera.

## **2. Peluang :**

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD di kota Pekanbaru pada tahun 2016 adalah 97,69% dan (96,54%), APK dan APM untuk pendidikan dasar (SD/MI) 113,86% dan 105,73%, APK dan APM untuk sekolah menengah pertama (SMP/MTs) 100,61% dan 96,28%.
2. Adanya dukungan kebijakan untuk melaksanakan PAUD holistik dan integratif antara lain strategi nasional pelaksanaan PAUD HI; undang-undang terhadap pendidikan dan perkembangan anak (0-6 tahun); standar nasional PAUD (permendikbud 58/2009) dan lain-lain.
3. Adanya dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagi tenaga PAUD meskipun jumlahnya masih terbatas.
4. Menurunnya kesenjangan antar kelompok ekonomi baik pada pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.

## **3. Mutu :**

- a. Sebagian komponen sistem penjaminan kualitas pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar tidak selaras dengan filosofi dimana aspek operasional sekolah merupakan indikator terbaik kualitas pendidikan.
- b. Adanya beberapa kekhawatiran bahwa SPM yang akan di terapkan ke depan sangat ambisius.
- c. Pendataan dan pengolahannya di semua tingkat belum cukup mendukung perencanaan untuk pencapaian SPM pendidikan dasar.
- d. Kurangnya kesadaran para pemangku kepentingan dan staf sekolah terhadap SPM.

- e. Perlunya kejelasan peran masing masing jenjang pemerintahan dan kementerian serta lembaga dalam pengelolaan SPM.
- f. Kapasitas pemerintah yang belum sepenuhnya baik.
- g. Peningkatan kesejahteraan guru belum mampu meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran.
- h. Ujian nasional tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan.

#### **4. Tata Kelola :**

1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan.
2. Peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi dan antar pemerintah.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi pendidikan.
5. Peningkatan ketersediaan dan kualitas hasil penelitian kebijakan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan.
6. Pelaksanaan penerapan pendanaan dan pembiayaan pendidikan berbasis kinerja.
7. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan.
8. Peningkatan efisiensi dan efektifitas mekanisme pembiayaan pendidikan.

## BAB IV

### 4. TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat *impact* dan atau *outcome*, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih tepat guna pencapaian misi kepada daerah. Sesuai amanat Undang undang 23 tahun 2014 dimana RPJMD harus berpedoman kepada RPJMN maka terkait berbagai Agenda Prioritas dan Kebijakan Pembangunan nasional beserta sasaran kewilayahan yang ditetapkan telah pula diacu meski dengan penyesuaian terhadap target pencapaian.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4. 1.  
Tujuan dan Sasaran Misi RPJMD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN						KONDISI AKHIR
					2016	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi	Tujuan 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1 Rata-rata Nilai UN SD/MI	-	75.00	78.00	80.00	82.00	83.00	83.00	
				2 Rata-rata Nilai UN SMP/MTs	-	65.50	67.55	68.60	70.25	72.85	72.85	
2	Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik	Tujuan 5 Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas	2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB)	3 Laporan Keuangan Daerah.	n.a							
				3 Nilai IKM Dinas Pendidikan	n.a	81,26	82	82	82,5	83	83	
			3 Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4 Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan	C	B	B	BB	A	A	A	
				5 Nilai LPPD	2,89	3,00	3,03	3,05	3,10	3,15	3,15	

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.2. sebagaimana berikut ini :

Tabel 4. 2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					TARGET AKHIR RENSTRA
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai IKM Dinas Pendidikan	Nilai	n.a	81,26	82	82	82,5	83	83
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas	Nilai AKIP Dinas Pendidikan	Kategori	n.a	B	B	BB	BB	A	A
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Pemerataan akses PAUD dan Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	-	34.85	35.00	35.15	35.45	36.00	36.00
			Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi	%	-	24.75	25.00	25.25	25.50	25.75	25.75
			Persentase lembaga kursus terakreditasi	%	-	24.75	25.00	25.25	25.50	25.75	25.75
			Persentase lembaga kesetaraan terakreditasi	%	-	24.75	25.00	25.25	25.50	25.75	25.75
		Meningkatnya mutu dan akses lembaga pendidikan dasar bagi masyarakat	Persentase Angkat kelulusan - SD/MI - SMP/MTs	%	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					TARGET AKHIR RENSTRA
						2018	2019	2020	2021	2022	
			Rerata Nilai USBN/UN - SD/MI - SMP/MTs	%	-	75.00 65.50	78.00 67.00	80.00 68.60	82.00 70.25	83.00 72.85	83.00 72.85
			Persentase Angka Partisipasi Kasar - SD/MI - SMP/MTs	%	-	107.31 95.00	108.63 95.68	113.00 95.58	113.25 96.15	113.50 96.35	113.50 96.35
			Persentase Angka Partisipasi Murni - SD/MI - SMP/MTs	%	-	96.04 80.00	95.56 83.83	95.00 72.21	95.35 76.50	95.50 80.05	95.50 80.05
			Persentase Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs	%	-	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
			Persentase Angka Melanjutkan Sekolah - Dari SD/MI ke SMP/MTs - SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	-	85.00 -	85.25 92.00	85.50 92.35	85.75 92.50	86.25 93.00	86.25 93.00
			Persentase anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang menuntaskan pendidikan di SMP/MTs	%	-	15.75	16.00	16.25	16.35	16.55	16.55
			Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM - SD/MI - SMP/MTs	%	-	72.75 54.55	74.00 55.00	74.15 55.15	74.25 55.25	74.45 55.45	74.45 55.45

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					TARGET AKHIR RENSTRA
						2018	2019	2020	2021	2022	
			Persentase Satuan Pendidikan Ber-Akreditasi A : - SD/MI - SMP/MTs	%	-	49.65 41.75	50.00 42.00	52.15 42.25	52.50 42.35	53.00 52.50	53.00 52.50
		Tersedianya Pendidik dan Tenaga Pendidikan Yang Berkualitas	Persentase Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Persentase Pendidik yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik	%	-	85.00	85.35	85.45	85.55	85.75	85.75
			Persentase Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat Kepala Sekolah	%	-	74.75	75.00	75.25	75.50	75.75	75.75
			Persentase Pengawas Sekolah yang memiliki Sertifikat Pengawas	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Persentase Satuan Pendidikan dengan jumlah guru sesuai SPM	%	-	69.85	71.00	71.25	71.35	71.50	71.50

# BAB V

## 1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### A. Strategi Pelayanan Pendidikan Yang Merata Dan Berkeadilan, dengan arah kebijakan :

1. Pengembangan Sekolah Gratis Tingkat SD, SMP dalam rangka Penguatan Wajar Dikdas sembilan Tahun dan rintisan wajar Dikmen 12 Tahun pada tahun 2017.
2. Perluasan sekolah inklusif SD/SMP
3. Penuntasan buta aksara.
4. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
6. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
7. Pengembangan standar pelayanan pendidikan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional (SPN).

### B. Strategi Mewujudkan Mutu dan Keunggulan Pendidikan, dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan penggunaan sumber daya utama (infrastruktur, ICT, perpustakaan sekolah dan laboratorium).
2. Pengembangan dan pengawasan kapasitas guru.
3. Pengembangan kurikulum, kualitas materi dan metode pembelajaran.
4. Melaksanakan Kemitraan Global.
5. Standar kualifikasi dan kompetensi guru.
6. Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak.
7. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal dan informal (PNFI).

### C. Strategi Tata Kelola Pendidikan yang baik dan Akuntabel, dengan arah kebijakan :

1. Mekanisme akuntabilitas publik dengan penajaman pada peran *stakeholders* dalam fungsi pengawasan.

2. Sistem informasi berbasis ICT untuk menginformasikan kinerja satuan pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan, usulan dan informasi lainnya yang dapat diakses setiap waktu oleh publik dan semua *stakeholders*.
3. Peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer

## BAB VI

### 2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang direncanakan untuk Periode Tahun 2017 – 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2017-2022 Kota Pekanbaru dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan Kewenangan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formall, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1. sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan  
Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai IKM Dinas Pendidikan	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi														
			01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	100%	950 Surat	155,000,000	950 Surat	155,000,000	950 Surat	155,000,000	950 Surat	155,000,000	950 Surat	155,000,000	950 Surat	155,000,000	100%
			01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	12 bulan	1,200,000,000	12 bulan	1,250,000,000	12 bulan	1,300,000,000	12 bulan	1,325,000,000	12 bulan	1,350,000,000	12 bulan	1,350,000,000	12 bulan
			01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak jalan	100%	10 Mobil dan 75 Motor	675,000,000	11 Mobil dan 75 Motor	875,000,000	11 Mobil dan 75 Motor	875,000,000	12 Mobil dan 75 Motor	875,000,000	12 Mobil dan 75 Motor	955,000,000	12 Mobil dan 75 Motor	955,000,000	12 Mobil dan 75 Motor
			01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah lembaga yang tersedia sarana kebersihan	100%	1 Kantor dan 6 Sekretariat	7,500,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretariat	8,255,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretariat	8,255,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretariat						
			01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerjanya layak pakai	75 AC dan 75 Komputer	75 AC dan 75 Komputer	525,000,000	75 AC dan 75 Komputer	525,000,000	75 AC dan 75 Komputer	525,000,000	75 AC dan 75 Komputer	525,000,000	75 AC dan 75 Komputer	525,000,000	75 AC dan 75 Komputer	525,000,000	75 AC dan 75 Komputer
			01.1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah lembaga yang terpenuhi kebutuhan ATK	1 Kantor dan 6 Sekretariat	1 Kantor dan 6 Sekretariat	238,209,640	1 Kantor dan 6 Sekretariat	185,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretaria	185,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretariat	185,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretariat	185,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretariat	185,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah lembaga yang terpenuhi cetakan dan penggandaan	1 Kantor dan 6 Sekretaris	1 Kantor dan 6 Sekretariat	385,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretariat	350,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretariat	350,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretariat	350,000,000	1 Kantor dan 6 Sekretariat	1 Kantor dan 6 Sekretariat	
			01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kantor yang terpenuhi komponen instalasi listrik	1 Kantor, 254 Sekoalh dan 6 Sekretariat	1 Kantor, 254 Sekoalh dan 6 Sekretariat	87,000,000	1 Kantor, 254 Sekoalh dan 6 Sekretariat	87,000,000	1 Kantor, 254 Sekoalh dan 6 Sekretariat	98,575,000	1 Kantor, 254 Sekoalh dan 6 Sekretariat	99,000,000	1 Kantor, 254 Sekoalh dan 6 Sekretariat	100,000,000	1 Kantor, 254 Sekoalh dan 6 Sekretariat
			01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundangan yang terpenuhi	1 Kantor Dinas	1 Kantor Dinas	57,500,000	1 Kantor Dinas	57,500,000	1 Kantor Dinas	57,500,000	1 Kantor Dinas	57,500,000	1 Kantor Dinas	57,500,000	1 Kantor Dinas
			01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terpenuhi	100%	12 bulan	456,000,000	12 bulan	456,000,000	12 bulan	535,500,000	12 bulan	545,350,000	12 bulan	545,365,500	12 bulan
			01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang terpenuhi	130 kali	230 Kali	1,100,000,000	230 Kali	1,250,000,000	230 Kail	1,155,000,000	230 Kali	1,255,000,000	230 Kali	1,255,064,500	230 Kali
			<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja</b>												
			02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	9 unit	1 unit	350,000,000	1 unit	520,000,000	-	-	1 unit	350,000,000	-	-	12 Unit
			02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah kantor yang terpenuhi kebutuhan perlengkapan kantor	100%	1 Kantor Dinas	85,000,000	1 Kantor Dinas	85,000,000	1 Kantor Dinas	95,000,000	1 Kantor Dinas	95,000,000	1 Kantor Dinas	97,000,000	1 Kantor Dinas
			02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah kantor yang terpenuhi peralatan kantor	100%	1 Kantor Dinas	329,000,000	1 Kantor Dinas	130,030,000	1 Kantor Dinas	155,000,000	1 Kantor Dinas	175,000,000	1 Kantor Dinas	185,000,000	1 Kantor Dinas
			02.10	Pengadaan mebeulair kantor	Jumlah kantor yang terpenuhi mebeulair	100%	1 Kantor Dinas	170,776,836	1 Kantor Dinas	187,500,000	1 Kantor Dinas	194,891,940	1 Kantor Dinas	152,982,123	1 Kantor Dinas	206,481,658	1 Kantor Dinas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah kantor yang direhab	100%	1 Kantor Dinas	200,000,000	1 Kantor Dinas	200,000,000	1 Kantor Dinas	200,000,000	1 Kantor Dinas	200,000,000	1 Kantor Dinas	200,000,000	1 Kantor Dinas
			III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase rata-rata kehadiran pegawai		-	-	100%	85,000,000	-	-	100%	95,000,000	-	-	100%
			1	Pakaian dinas harian	Jumlah pakaian Dinas	0%	-	0	150 stel	85,000,000	-	0	150 stel	95,000,000	-	0	150 stel
			IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar												
			05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	0%	6 orang	75,000,000	6 orang	75,000,000	6 orang	75,000,000	6 orang	75,000,000	6 orang	75,000,000	30 orang
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP Dinas Pendidikan	I	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan Kinerja dan Keuangan												
			6.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	3 Dokumen	3 Dokumen (AKIP, LPPD dan LKPJ)	15,000,000	3 Dokumen (AKIP, LPPD dan LKPJ)	15,000,000	3 Dokumen (AKIP, LPPD dan LKPJ)	7,500,000	3 Dokumen (AKIP, LPPD dan LKPJ)	7,500,000	3 Dokumen (AKIP, LPPD dan LKPJ)	7,500,000	3 Dokumen (AKIP, LPPD dan LKPJ)
			6.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan (LKD)	10,000,000	1 Laporan (LKD)	10,000,000	1 Laporan (LKD)	10,500,000	1 Laporan (LKD)	10,500,000	1 Laporan (LKD)	10,500,000	5 Laporan (LKD)
			6.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan (LKD)	12,500,000	1 Laporan (LKD)	12,500,000	1 Laporan (LKD)	12,500,000	1 Laporan (LKD)	12,500,000	1 Laporan (LKD)	12,500,000	5 Laporan (LKD)
	Pemerataan akses PAUD dan Pendidikan Non Formal	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD	I	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya layanan PAUD												

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		2. Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi.	15.01	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah lembaga yang menerima bantuan	3 Sklh	1 Sekolah	3,000,000,000	1 Sekolah	3,000,000,000	1 Sekolah	3,000,000,000	1 Sekolah	3,000,000,000	1 Sekolah	3,000,000,000	7 sekolah
		3. Persentase lembaga kursus terakreditasi.	15.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah lembaga TKN yang menerima bantuan	3 TKN	1 Sekolah	195,000,000	1 Sekolah	195,000,000	1 Sekolah	195,000,000	1 Sekolah	195,000,000	1 Sekolah	195,000,000	5 Sekolah
		4. Persentase lembaga kesetaraan terakreditasi.	15.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah lembaga TKN yang menerima bantuan pagar, taman dan paving blok	3 Sklh	1 Sekolah	185,000,000	1 Sekolah	185,000,000	1 Sekolah	185,000,000	1 Sekolah	185,000,000	1 Sekolah	185,000,000	5 Sekolah
			15.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah lembaga TKN yang menerima bantuan sarana air bersih dan WC TK	3 Sklh	1 sekolah	115,000,000	3 sekolah	300,000,000	3 sekolah						
			15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah lembaga TKN yang menerima bantuan	n.a	1 sekolah	200,000,000	1 sekolah	200,000,000	1 sekolah	200,000,000	1 sekolah	200,000,000	1 sekolah	200,000,000	5 sekolah
			15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah lembaga TKN yang menerima bantuan	3 TKN	1 sekolah	400,000,000	1 sekolah	400,000,000	1 sekolah	400,000,000	1 sekolah	400,000,000	1 sekolah	400,000,000	5 sekolah
			15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD	Jumlah peserta workshop		250 peserta	175,000,000	250 peserta	210,000,000	250 peserta	125,000,000	250 peserta	210,000,000	250 peserta	210,000,000	1.250 peserta
			15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta pelatihan senam pesona anak Riau		250 peserta	210,000,000	250 peserta	210,000,000	250 peserta	175,000,000	250 peserta	210,000,000	250 peserta	210,000,000	1.250 peserta
			15.62	Pengembangan kurikulum, Bahan Ajar dan model pembelajaran PAUD	Jumlah peserta bimtek Pengembangan kurikulum PAUD		200 peserta	175,000,000	250 peserta	210,000,000	200 peserta	175,000,000	250 peserta	210,000,000	250 peserta	210,000,000	1.150 peserta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			15.63	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta bimtek sekolah berwawasan gender		200 peserta	175,000,000	200 peserta	183,750,000	1.000 peserta						
			15.64	Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta bimtek Akreditasi Lembaga PAUD		200 peserta	175,000,000	250 peserta	200,000,000	1.200 peserta						
			15.67	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas didik PAUD bidang seni dan budaya	Jumlah Cabang Olahraga		6 Cab. Lomba	250,000,000	6 Cab. Lomba	250,000,000	6 Cab. Lomba	250,000,000	6 Cab. Lomba	250,000,000	6 Cab. Lomba	250,000,000	6 Cab. Lomba
			15.69	Penyelenggaraan Jambore PAUD Kota Pekanbaru	Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti pemilihan pendidik PAUD berprestasi dan Jambore PAUD	262 lembaga	200 lembaga	350,000,000	200 lembaga	350,000,000	200 lembaga	350,000,000	200 lembaga	350,000,000	200 lembaga	350,000,000	200 lembaga
			15.73	Revitalisasi gedung sekolah	Jumlah lembaga yang menerima bantuan	3 TKN	1 sekolah	150,000,000	1 sekolah	500,000,000	3 sekolah						
			<b>II</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Meningkatnya layanan PNF</b>												
			18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah peseta pelatihan	100%	100 orang	72,000,000	150 orang	115,000,000	700 orang						
			18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah guru kesetaraan yang menerima honor	100%	16 Pendidik	205,000,000	16 Pendidik	205,000,000	16 Pendidik	205,000,000	16 Pendidik	205,000,000	16 Pendidik	205,000,000	16 Pendidik
			18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah peserta pelatihan bagi siswa yang putus sekolah dan masyarakat	n.a	150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	750 orang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			18.09	Pengembangan Kurikulum, Bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah peserta pelatihan Kurikulum	200 orang	100 orang	150,000,000	150 orang	175,000,000	700 orang						
			18.14	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah peserta pelatihan Senam Pesona	50%	150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	750 orang
			18.15	Penyelenggaraan Apresiasi pendidikan Non formal	Jumlah lembaga yang mengikuti Apresiasi Bagi PTK PAUDNI Berprestasi	250	200 orang	250,000,000	200 orang	250,000,000	200 orang	250,000,000	200 orang	250,000,000	200 orang	250,000,000	1.000 orang
			18.16	Peningkatan Kompetensi warga belajar kesetaraan dan lembaga non formal	Jumlah lembaga penerima BOP Kesetaraan		1 Lembaga	215,000,000	1 Lembaga	235,000,000	1 Lembaga						
			18.17	Peningkatan Kompetensi pengelola Lembaga Pendidikan Non Formal	Jumlah peserta Bimtek bagi pendidik dan pengelola PNF		150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	150 orang	175,000,000	150 orang
	<b>Meningkatnya akses dan mutu lembaga pendidikan dasar bagi masyarakat</b>	<b>1. Persentase Angkat kelulusan SD/MI dan SMP/MTs</b>	I	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>Pelayanan Pendidikan Dasar yang Terjangkau dan Berkualitas</b>												
			16.01	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD		1 unit	3,000,000,000	1 unit	3,000,000,000	2 unit	6,000,000,000	3 unit	9,000,000,000	3 unit	9,000,000,000	10 unit
			16.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah lembaga SDN yang mendapat bantuan rumah penjaga sekolah		4 sekolah	720,000,000	4 sekolah	720,000,000	4 sekolah	836,000,000	4 sekolah	836,000,000	4 sekolah	836,000,000	20 sekolah
			16.03	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah lembaga SDN yang mendapat bantuan		15 RKB	4,342,560,000	10 RKB	2,895,040,000	10 RKB	2,895,040,000	12 RKB	3,474,048,000	18 RKB	5,211,072,000	62 RKB
		<b>2. Rerata Nilai USBN/UN SD/MI dan SMP/MTs</b>	16.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah lembaga SMP yang mendapat bantuan		3 Sekolah	600,000,000	3 Sekolah	600,000,000	3 Sekolah	600,000,000	3 Sekolah	600,000,000	3 Sekolah	900,000,000	15 Sekolah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		3. Partisipasi Kasar SD/MI dan MP/MTs	16.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah lembaga SDN yang mendapat bantuan pagar dan paving block		4 Sekolah	720,000,000	4 Sekolah	720,000,000	4 Sekolah	720,000,000	4 Sekolah	720,000,000	6 sekolah	1,080,000,000	22 Sekolah
		4. Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs	16.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah lembaga SD yang mendapat bantuan		2 sekolah	350,000,000	2 sekolah	350,000,000	2 sekolah	350,000,000	2 sekolah	350,000,000	2 sekolah	350,000,000	10 sekolah
		5. Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	16.11	Pembangunan ruang ibadah	Jumlah lembaga SD yang mendapat bantuan		3 sekolah	600,000,000	3 sekolah	600,000,000	3 sekolah	600,000,000	4 sekolah	800,000,000	3 sekolah	600,000,000	15 sekolah
			16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah lembaga SD dan SMP yang mendapat bantuan		4 sekolah	1,200,000,000	4 sekolah	1,200,000,000	4 sekolah	1,200,000,000	4 sekolah	1,200,000,000	4 sekolah	1,200,000,000	20 sekolah
			16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah lembaga SD yang mendapat bantuan WC		6 sekolah	600,000,000	6 sekolah	600,000,000	5 sekolah	500,000,000	6 sekolah	600,000,000	6 sekolah	600,000,000	30 sekolah
		6. Persentase Angka Melanjutkan Sekolah Dari SD/MI ke SMP/MTs dan Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah lembaga SD dan SMP yang mendapat bantuan	100%	1 Kegiatan	775,000,000	1 Kegiatan	775,000,000	1 Kegiatan	775,000,000	1 Kegiatan	775,000,000	1 Kegiatan	775,000,000	1 Kegiatan
			16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah lembaga SD yang mendapat bantuan		1 Kegiatan	620,496,000	1 Kegiatan	462,230,605	1 Kegiatan	455,466,088	1 Kegiatan	591,119,484	1 Kegiatan	620,065,000	5 Kegiatan
			16.19	Pengadaan mebeulair sekolah	Jumlah lembaga SDN yang mendapat bantuan	22 SD	1 Kegiatan	3,250,000,000	1 Kegiatan	3,250,000,000	1 Kegiatan	3,250,000,000	1 Kegiatan	3,250,000,000	1 Kegiatan	3,250,000,000	5 Kegiatan
			16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah lembaga SD yang mendapat bantuan		10 sekolah	2,000,000,000	10 sekolah	2,000,000,000	12 sekolah	2,400,000,000	10 sekolah	2,000,000,000	10 sekolah	2,000,000,000	52 sekolah
			16.58	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Jumlah peserta pelatihan		100 peserta	115,000,000	100 peserta	115,000,000	100 peserta	115,000,000	100 peserta	115,000,000	100 peserta	115,000,000	500 peserta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7. Persentase anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera yang menuntaskan pendidikan di SMP/MTs  8. Persentase Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM SD/MI dan SMP/MTs  9. Persentase Satuan Pendidikan Ber-Akreditasi A : SD/MI dan SMP/MTs	16.59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah peserta pelatihan		80 peserta	75,000,000	80 peserta	75,000,000	80 peserta	75,000,000	80 peserta	75,000,000	80 peserta	75,000,000	400 peserta	
	16.63		Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi BOS	n.a	SD=301 SMP=131	65,000,000	SD=304 SMP=135	65,000,000	SD=308 SMP=139	65,000,000	SD=312 SMP=143	65,000,000	SD=316 SMP=144	65,000,000	SD=316 SMP=144		
	16.68		Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah peserta Ujian			48,000,000	0.02%	48,000,000	0.15%	48,000,000	0.10%	48,000,000	0.01%	48,000,000	0.01%		
	16.69		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS	Jumlah peserta pelatihan manajemen pengelolaan sekolah bagi Kasek jenjang Dikdas		120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	600 peserta
	16.70		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah prestasi siswa OSN SD	100 Siswa	150 Siswa	250,000,000	150 Siswa	250,000,000	150 Siswa	250,000,000	150 Siswa	250,000,000	150 Siswa	250,000,000	150 Siswa	250,000,000	150 Siswa
	16.71		Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)	Jumlah peserta Workshop Inovasi Pembelajaran Guru SMP		120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	600 peserta
	16.72		Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi	Jumlah peserta pelatihan TIK pada proses pembelajaran		120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	600 peserta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			16.79	Penyediaan Bantuan Proses Belajar Mengajar (PBM)	Jumlah sekolah penerima BOSDA	234 SD/SMP	238 SD/SMP	3,300,000,000	240 SD/SMP	3,300,000,000	242 SD/SMP	3,300,000,000	244 SD/SMP	3,300,000,000	246 SD/SMP	3,300,000,000	246 SD/SMP
			16.80	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMP	44 SMPN	1 unit	3,700,000,000	1 unit	3,700,000,000	1 unit	3,700,000,000	2 unit	7,400,000,000	2 unit	7,400,000,000	7 Unit
			16.81	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SMP	Jumlah lembaga SMPN yang mendapat bantuan		3 sekolah	57,000,000	3 sekolah	57,000,000	3 sekolah	57,000,000	3 sekolah	57,000,000	3 sekolah	57,000,000	15 sekolah
			16.83	Pembangunan rumah ibadah SMP	Jumlah lembaga SMP yang mendapat bantuan Musholla		3 sekolah	900,000,000	2 sekolah	600,000,000	9 sekolah						
			16.84	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah lembaga SMP yang mendapat bantuan		1 Kegiatan	725,000,000	1 Kegiatan	3,300,000,000	1 Kegiatan	3,300,000,000	1 Kegiatan	3,300,000,000	1 Kegiatan	3,500,000,000	5 Kegiatan
			16.85	Pengadaan mebeulair sekolah	Jumlah lembaga SMPN yang mendapat bantuan		1 Kegiatan	1,480,000,000	1 Kegiatan	2,500,000,000	1 Kegiatan	1,500,000,000	1 Kegiatan	1,500,000,000	1 Kegiatan	2,000,000,000	5 kegiatan
			16.86	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMP	Jumlah lembaga yang mendapat bantuan		5 sekolah	1,000,000,000	5 sekolah	1,000,000,000	5 sekolah	1,000,000,000	5 sekolah	1,000,000,000	5 sekolah	1,000,000,000	25 sekolah
			16.87	Pembinaan kegiatan UKS jenjang SMP	Jumlah peserta pelatihan UKS untuk siswa SMP		120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	600 peserta
			16.88	Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Jenjang SD	Jumlah peserta USBN		16.750 siswa	275,000,000	16.750 siswa	285,000,000	83.750 siswa						
			16.89	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Jenjang SD	Jumlah lembaga yang mengikuti PPBD	100%	1 Kegiatan	195,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	450,000,000	1 Kegiatan	450,000,000	1 Kegiatan	450,000,000	5 Kegiatan
			16.90	Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SMP	Jumlah peserta UN	n.a	151 SMP/MTs	215,000,000	151 SMP/MTs	328,906,860	151 SMP/MTs						
			16.91	Pendidikan Palang Merah Remaja (PMR) peserta didik dikdas	Jumlah peserta pelatihan		100 peserta	95,000,000	100 peserta	95,000,000	100 peserta	95,000,000	100 peserta	95,000,000	100 peserta	95,000,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			16.92	Pendidikan Pramuka Bagi Peserta Didik Jenjang Dikdas	Jumlah peserta pelatihan		100 peserta	190,000,000	100 peserta	190,000,000	100 peserta	190,000,000	100 peserta	190,000,000	100 peserta	190,000,000	500 peserta
			16.93	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Jenjang SMP	Jumlah lembaga SMP yang mengikuti PPDB	100%	1 Kegiatan	450,000,000	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	650,000,000	1 Kegiatan	650,000,000	1 Kegiatan	650,000,000	5 Kegiatan
			16.95	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas peserta didik bidang seni dan budaya	Jumlah prestasi siswa bidang Seni jenjang SD		800 peserta	250,000,000	800 peserta	255,000,000	500 peserta						
			16.101	Lomba olimpiade sains nasional (OSN) jenjang SMP	Jumlah prestasi siswa OSN SMP		100 peserta	115,000,000	100 peserta	115,000,000	100 peserta	115,000,000	100 peserta	115,000,000	100 peserta	115,000,000	4.000 peserta
			16.102	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas peserta didik bidang seni dan budaya SMP	Jumlah prestasi siswa bidang Seni jenjang SMP		800 peserta	355,000,000	800 peserta	255,000,000	500 peserta						
			16.103	Pembinaan Kegiatan UKS jenjang Dikdas	Jumlah peserta pelatihan UKS		120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	120 peserta	115,000,000	4.000 peserta
			16.107	Penyediaan anggaran untuk SMP Negeri Madani Pekanbaru	Terpenuhinya Operasional Penyelenggaraan Sekolah SMP Madani	n.a	1 Tahun	4,500,000,000	1 Tahun	4,500,000,000	1 Tahun	5,800,000,000	1 Tahun	5,800,000,000	1 Tahun	6,300,000,000	5 tahun
			16.108	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Siswa dalam Bidang Olahraga	Jumlah prestasi siswa O2SN jenjang SD		6 Cab. Lomba	355,000,000	6 Cab. Lomba	355,000,000	6 Cab. Lomba	355,000,000	6 Cab. Lomba	355,000,000	6 Cab. Lomba	355,000,000	6 Cab. Lomba
			16.109	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Siswa dalam Bidang Olahraga	Jumlah prestasi siswa O2SN jenjang SMP		6 Cab. Lomba	355,000,000	6 Cab. Lomba	355,000,000	6 Cab. Lomba	355,000,000	6 Cab. Lomba	355,000,000	6 Cab. Lomba	355,000,000	6 Cab. Lomba
			16.110	Revitalisasi gedung sekolah (SD)	Jumlah lembaga SDN mendapat bantuan		18 RKB	990,000,000	18 RKB	1,000,000,000	25 RKB	1,500,000,000	30 RKB	2,000,000,000	35 RKB	3,000,000,000	126 RKB

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			16.111	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	Jumlah lembaga SMP yang mendapat bantuan WC		4 sekolah	400,000,000	7 sekolah	700,000,000	4 sekolah	400,000,000	5 sekolah	500,000,000	4 sekolah	400,000,000	24 sekolah
			16.112	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SMP	Jumlah lembaga SMP yang mendapat bantuan UKS		3 sekolah	310,000,000	3 sekolah	310,000,000	3 sekolah	310,000,000	3 sekolah	310,000,000	3 sekolah	310,000,000	15 sekolah
			16.113	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP	Jumlah lembaga SMP yang mendapat pagar dan paving blok		3 sekolah	540,000,000	3 sekolah	540,000,000	4 sekolah	720,000,000	3 sekolah	540,000,000	6 unit	1,080,000,000	19 sekolah
			16.114	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah lembaga SMP mendapat bantuan		6 RKB	1,954,152,000	4 RKB	1,302,768,000	8 RKB	2,605,536,000	8 RKB	2,605,536,000	8 RKB	2,605,536,000	34 RKB
			16.115	Revitalisasi gedung sekolah (SMP)	Jumlah lembaga SMPN mendapat bantuan		6 Ruang Kelas	2,254,152,000	6 Ruang Kelas	2,254,152,000	6 Ruang Kelas	2,254,152,000	6 Ruang Kelas	2,254,152,000	8 Ruang Kelas	5,500,000,000	25 sekolah
			II	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>Meningkatnya layanan pendidikan bagi masyarakat</b>												
			22.04	Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan	300	300 Peserta	400,000,000	300 Peserta	425,000,000	1.500 Peserta						
			22.07	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah peserta bimtek pendataan		420 peserta	95,000,000	420 peserta	95,000,000	420 peserta	95,000,000	420 peserta	115,000,000	420 peserta	125,000,000	2.100 peserta
			22.08	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah peserta yang mengikuti rapat Dinas Pendidikan dan Dapodik	840 Sekolah	840 Sekolah	275,000,000	845 Sekolah	275,000,000	847 Sekolah	275,000,000	850 Sekolah	275,000,000	855 Sekolah	275,000,000	855 Sekolah
			22.11	Manajemen Pengelolaan Aset Sekolah	Jumlah peserta pelatihan		238 peserta	350,000,000	238 peserta	350,000,000	238 peserta	350,000,000	238 peserta	350,000,000	238 peserta	350,000,000	238 peserta
			22.12	Perencanaan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen Reviu Renstra Dinas Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	125,000,000	5 Dokumen



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap tahun Dinas Pendidikan Penanggung Jawab										Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			20.14	Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat SD	Jumlah peserta pelatihan Kurikulum 13 bagi Guru SD		300 peserta	325,000,000	300 peserta	325,000,000	300 peserta	325,000,000	300 peserta	325,000,000	300 peserta	325,000,000	1.500 peserta
			20.15	Pelatihan KTSP Tingkat SD	Jumlah peserta pelatihan penyusunan KTSP		200 peserta	255,000,000	200 peserta	255,000,000	200 peserta	255,000,000	200 peserta	255,000,000	200 peserta	255,000,000	1.000 peserta
			20.16	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah peserta pelatihan Guru Pembina Olimpiade Sains Dikdas		150 peserta	145,000,000	150 peserta	145,000,000	150 peserta	145,000,000	150 peserta	145,000,000	150 peserta	145,000,000	750 peserta
			20.18	Pelatihan penyusunan RKS dan RKTM	Jumlah peserta pelatihan RKS dan RKTM jenjang SMP		160 peserta	155,000,000	160 peserta	155,000,000	160 peserta	155,000,000	160 peserta	155,000,000	160 peserta	155,000,000	800 peserta
			20.35	Diklat Pelatihan Calon Kepala Sekolah Tingkat SMP	Jumlah Kepala Sekolah yang memiliki NUKS		100 peserta	775,500,000	100 peserta	775,500,000	100 peserta	775,500,000	100 peserta	775,500,000	100 peserta	775,500,000	500 peserta
			20.39	Penghitungan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	Jumlah kenaikan pangkat guru		120 peserta	135,000,000	120 peserta	135,000,000	120 peserta	135,000,000	120 peserta	135,000,000	120 peserta	135,000,000	600 peserta
			20.43	Pelatihan Bagi Pengawas untuk memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah pengawas yang mengikuti cawas		80 peserta	240,000,000	80 peserta	475,000,000	80 peserta						
			20.45	Pelatihan penyusunan kurikulum sekolah (SMP)	Jumlah peserta pelatihan K13 bagi Guru SMP		150 peserta	155,000,000	150 peserta	155,000,000	150 peserta	155,000,000	150 peserta	155,000,000	150 peserta	155,000,000	750 peserta

## BAB VII

### 3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini akan disajikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 Pemerintah Kota Pekanbaru.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja yang menjadi Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut ini.

Tabel 7.1  
 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2016)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					TARGET AKHIR RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai IKM Dinas Pendidikan	n.a	81,26	82	82	82,5	83	83
2	Nilai AKIP Dinas Pendidikan	n.a	B	B	BB	BB	A	A
3	Rata-rata Nilai UN SD/MI dan SMP/MTs	-	75.00/65.50	78.00/67.55	80.00/68.60	82.00/70.25	83.00/72.85	83.00/72.85

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengacu pada Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					TARGET AKHIR RENSTRA
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	APK SD/MI/Paket A	%	-	107.31	108,63	113.00	113.25	113.50	113.50
2	APM SD/MI/Paket A	%	-	96.04	95,56	95.00	95.35	95.50	95.50
3	APK SMP/MTs/Paket B	%	-	95.00	95,68	95.58	96.15	96.35	96.35
4	APM SMP/MTs/Paket B	%	-	80.00	83,83	72.21	76.50	80.05	80.05

## BAB. VIII

### 7. P E N U T U P

Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2017- 2022 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : DESEMBER 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU

H. ABDUL JAMAL, M.Pd  
Pembina Tk.I  
NIP. 19701002 199512 1001